

Kampung KB Sebuah Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Keluarga

Oleh :
Rudy Suharta, SIP, MM.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bantul
Komplek Pemda II, Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul
Email: rudysanden68@gmail.com, Nomor HP: 081328713408

Abstrak

Sebagai sebuah inovasi dari program besar Keluarga Berencana, pembentukan Kampung KB merupakan terobosan sekaligus menjadikan sebuah miniatur sinergisitas dari berbagai kegiatan. Kampung KB adalah salah satu model pemberdayaan masyarakat yang berbasis Ketahanan Keluarga. Harapannya adalah Kampung KB menjadi sebuah percontohan Program Keluarga Berencana secara lebih terarah terpadu dan terencana serta berkelanjutan.

Kampung KB di Bantul dicanangkan pertama kali di tahun 2016 yakni Kampung KB Jasem dan Kampung KB Cepoko. Pada tahun 2019 dari 75 Desa, 47 Desa diantaranya telah melakukan rintisan Kampung KB. Penulis ingin mengetahui sejauh mana peran, serta keterpaduan lintas sektor dalam mencapai Kampung KB yang berkualitas. Memetakan permasalahan dan alternatif solusi jalan keluarnya itulah yang menjadikan Penulis tertarik meneliti dan menganalisa serta memberikan alternatif solusi pengembangan Kampung KB di Kabupaten Bantul. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang lebih fokus pada pemahaman suatu masalah daripada melihat permasalahan itu untuk digeneralisasi.

Hasil pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dukungan komitmen dan peranan aktif dari seluruh instansi Pemerintah baik Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta berbagai pihak sangat menentukan keberhasilan dan pengelolaan Kampung KB. Partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama dengan dukungan Pemerintah Desa menjadi bagian terpenting diawali dari perencanaan penetapan prioritas, sasaran dan program kegiatan yang dilakukan masyarakat secara swadaya dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kampung KB, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

As an innovation of Family Planning grand program, the establishment of Family Planning Village act as a breakthrough and a miniature of synergy of various actions. Family Planning Village is one of community empowerment model with family resilience based. Hopefully, this Family Planning Village could be a Family Planning Program exemplary which are better directed, integrated, well-planned, and sustainable.

Family Planning Village which are located in Bantul first established in 2016 namely Jasem Family Planning Village and Cempoko Family Planning Village. In 2019 from 75 villages, 47 of those has initiated Family Planning Village. Author wants to know how far the role and cross-sector integration in achieving an excellence Family Planning Village. Mapping problems and

alternative solutions are the ones that author finds enticing to deeper study and analyze, as well as providing alternative solution in developing Family Planning Village in Bantul Regency. Research method used in this study is descriptive qualitative method, which is a research focusing more on understanding a certain problem rather than seeing a problem to generalize.

The finding of this study shows that commitment support and active role of all government agencies whether district, sub-district, and village government, as well as many other parties are very much defining the success and management of Family Planning Village. Public figures participation, religious leaders, and village government's support are the most important in this case, starting from priority setup, target, and activity program that are done by community independently and sustainably.

Keywords: *Family Planning Village, Community Empowerment*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama yang melatarbelakangi diluncurkannya konsep Kampung KB adalah menggelorakan kembali Program KB pada tataran terbawah yakni Kampung atau setingkat RW dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Konsep pembangunan dengan memperkuat daerah-daerah pinggiran yang akan mampu maju dan berkembang bersama dalam memberdayakan masyarakat.

Sebagai sebuah inovasi dari program besar Keluarga Berencana, pembentukan Kampung KB merupakan terobosan sekaligus menjadikan sebuah miniatur sinergisitas dari kegiatan kegiatan nasional Keluarga Berencana. Harapannya adalah Kampung KB menjadi sebuah percontohan Program Keluarga Berencana secara lebih terarah terpadu dan terencana.

Kampung KB di Bantul dicanangkan pertama kali di tahun 2016 yakni Kampung KB Jasem dan Kampung KB Cepoko. Setiap tahunnya ditambahkan rintisan Kampung KB yang pada saat ini jumlah keseluruhan ada 47 kampung setingkat dusun di Kabupaten Bantul dengan berbagai potensi dan permasalahan yang ada.

Tahun 2019 merupakan tahun awal penyusunan target dari lintas komponen untuk meningkatkan kualitas Kampung KB. Arah dan kebijakan serta konsep pemberdayaan Kampung KB. Kebijakan pemberdayaan Kampung KB melalui kegiatan-kegiatan lintas sektoral pada Organisasi Perangkat Daerah sangat mendukung keberhasilan tujuan dicanangkan Kampung KB.

Penyusunan target Kampung KB pada Program KKBPK atau dengan istilah keren Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) menuju Kampung KB Mandiri dengan indikator output baru perlu disusun rencana kerja 5 tahunan. Rencana kerja tersebut menjadi acuan dan arah pengembangan potensi sumber daya yang ada di masing-masing lokasi.

Pengelolaan kampung KB era baru menuju kampung yang berkualitas dengan pengembangan ragam potensi daerah masing-masing. Untuk menuju kampung yang berkualitas perlunya kita petakan potensi daerah sebagai komoditas yang kita unggulkan.

Memetakan permasalahan dan alternatif solusi jalan keluarnya itulah yang menjadikan Penulis tertarik meneliti dan menganalisa serta memberikan alternatif solusi pengembangan Kampung KB di Kabupaten Bantul

RUMUSAN MASALAH

Uraian latar belakang diatas, menjadikan dasar pemikiran Penulis merumuskan masalah dalam penulisan ini. Rumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah Keterpaduan Lintas Sektor dalam mencapai Kampung KB Berkualitas?”

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sektor yang terlibat dan bagaimana keterlibatan dalam kegiatan Kampung KB.
2. Untuk mengetahui kendala dan rekomendasi mengatasi kendala yang akan dilakukan oleh masyarakat Kampung KB

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Kampung KB.
2. Untuk lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Kampung KB.
3. Memberikan tambahan pustaka tentang upaya yang sudah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dalam mengembangkan Kampung KB.

KERANGKA KONSEPTUAL

Keterpaduan Lintas Sektor

Keterpaduan lintas sektoral adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional dalam memadukan penyelenggaraan program pemerintah (wajib, pengembangan, inovasi) dengan berbagai program dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.

Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dan peranan aktif Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB merupakan suatu dukungan yang sangat penting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kampung KB (BKKBN 2017 :6).

Sejalan dengan itu menurut Soetomo pendekatan dalam banyak hal dapat dilihat sebagai operasionalisasi dari pespektif atau paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dalam pendekatan ini, masyarakat sampai pada tingkat komunitas terbawah diberi peluang dan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi (Soetomo 2013 : 65).

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan berbagai potensi Kampung KB tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendekatan yang dilakukan secara terpadu terarah terencana dan berkelanjutan. Strategi pendekatan yang dilakukan adalah dengan melibatkan lintas sektor.

Kampung KB berkualitas

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh dan bersinergi dengan mitra kerja dan instansi terkait (BKKBN 2017: 2).

Tabel 1. Pengelompok Klasifikasi Kampung KB Berdasarkan Variabel Input, Proses dan Output

Jenis Klasifikasi	Nilai Indikator	Keterangan
Dasar	Nilai indek input, proses dan output kurang dari 3; atau Salah satu indek dari input, proses, dan output ≥ 3	Pengelolaan kampung KB, baik input maupun proses, keduanya efektif, dan belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian program
Berkembang	Nilai indek input dan proses lebih dari 3; tetapi indek output lebih dari 3	Kampung KB sudah berjalan sesuai dengan harapan (<i>on track</i>), namun belum memiliki kontribusi terhadap pencapaian
Mandiri	Indek input atau proses lebih dari 3; dan indek output lebih dari 3.	Kampung KB sudah memiliki kontribusi terhadap pencapaian, tetapi pengelolaannya belum efektif
Berkelanjutan (paripurna)	Nilai indek input, proses, dan output mencapai lebih dari 3	Pengelolaan kampung KB dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian

Optimalisasi dan sinergisitas berbagai lintas sektor menjadi tolok ukur keberhasilan dan kualitas pencapaian tujuan dicanangkan Kampung KB. Kualitas Kampung KB tercermin dari sinergisitas potensi yang ada pada kampung itu sendiri yang dapat dioptimalkan secara terpadu dengan berbagai lintas sektor. Hal ini sejalan dengan konsep upaya membangun masyarakat dari pinggiran menuju masyarakat sejahtera dan berkualitas. Hal yang tidak kalah penting adalah melakukan pemetaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kampung KB serta melakukan pemetaan ulang. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat Peta Jalan Kampung KB 2020-2024 agar sasaran yang ingin dicapai terarah dan terprogram.

RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Peneliti membatasi ruang lingkup pada keterpaduan lintas sektor menuju Kampung KB berkualitas yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang lebih fokus pada pemahaman suatu masalah daripada melihat permasalahan itu untuk digeneralisasi.

Dalam metode deskriptif ini peneliti membuat gambaran kejadian secara luas dan mendalam dengan tujuan mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena dan keadaan yang terjadi serta menyuguhkan data apa adanya.

OBYEK PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah keterpaduan lintas sektoral pada 47 Kampung KB di Kabupaten Bantul.

TEKNIK PEMILIHAN SUBYEK PENELITIAN

Subyek penelitian kualitatif ini menggunakan informan yakni seseorang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti yang merupakan gambaran keadaan lapangan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang diperoleh bersumber dari pustaka, buku panduan, dokumentasi serta wawancara dan observasi pada Kampung KB yang ada di Kabupaten Bantul.

WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Semester I tahun 2020.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan dari sejak awal peneliti melakukan pengumpulan data dokumentasi, observasi dan wawancara serta memperhatikan panduan pembentukan kampung KB.

Data yang diperoleh di lapangan dituangkan kedalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil data kemudian dikaji untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat kampung

KB dan dapat dijadikan dasar rekomendasi untuk mengatasi kendalanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI KAMPUNG KB

Kampung KB sebagai sebuah model pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh BKKBN sebagai prioritas program percepatan pembangunan dengan mempercepat pembangunan di daerah pinggiran. Pencapaian target dan sasaran program dengan memperkuat kegiatan-kegiatan prioritas secara komprehensif dan berkelanjutan

Langkah penguatan Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) diharapkan mempunyai daya ungkit untuk mempercepat ketercapaian program. Inovasi strategis dan implementasi Bangga Kencana diimplementasikan dalam sebuah miniature Kampung KB.

Sinergisitas antar lembaga, mitra kerja, dan *stakeholders* disesuaikan dengan kearifan lokal serta kondisi wilayah masing-masing.

Kriteria Utama pembentukan Kampung KB yang wajib dipenuhi adalah:

1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I kampung tersebut diatas rata-rata jika dibandingkan antar kampung dimana Desa tersebut berada.
2. Jumlah kepesertaan KB dibawah rata-rata pencapaian jika dibandingkan antar kampung dimana Desa tersebut berada.

Kriteria kewilayahan juga dapat dipakai sebagai pertimbangan pembentukan Kampung KB (kawasan miskin, kawasan wisata, kepadatan penduduk tinggi). Kriteria khusus juga dapat dipakai untuk menentukan lokasi kampung KB (tingkat putus sekolah

tinggi, partisipasi masyarakat rendah atau kriteria program lainnya sesuai perkembangan)

PERSEBARAN KAMPUNG KB

Kampung KB yang dicanangkan pertama di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 adalah

Kampung KB Jasem dan Kampung KB Cepoko. Dalam perkembangannya sampai tahun 2019 dari 75 Desa yang ada di Kabupaten Bantul, terdapat 47 Desa yang sudah mencanangkan Kampung KB.

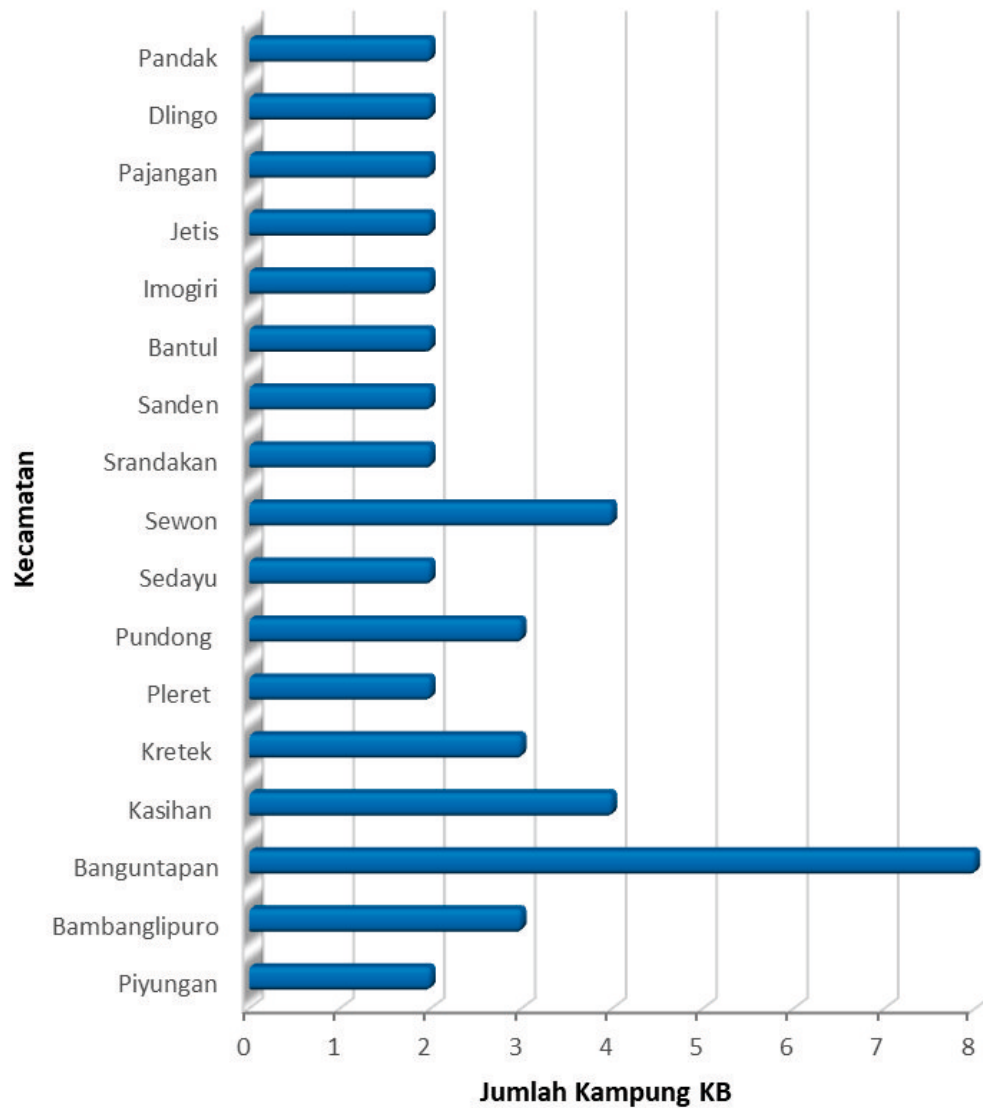
Dari 47 Desa di Kabupaten Bantul yang sudah mencanangkan Kampung KB dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Kampung KB dan Tahun Pencanangan

No	Kecamatan	Jumlah	Dusun	Desa	Tahun
1	Piyungan	2	Jasem	Srimulyo	2016
			Sanansari	Srimartani	2017
2	Bambanglipuro	3	Ngajaran	Sidomulyo	2017
			Kintelan	Sumbermulyo	2018
			Warung Pring	Mulyodadi	2019
3	Banguntapan	8	Mertosanan Kulon	Potorono	2017
			Sayangan	Jagalan	2018
			Pamotan	Jambidan	2019
			Nglebeng	Tamanan	2019
			Sampangan	Wirokerten	2019
			Singosaren III	Singosaren	2019
			Gilang	Baturetno	2019
			Plumbon	Banguntapan	2018
4	Kasihan	4	Glondong	Tirtonirmolo	2017
			Sambikerep	Bangunjiwo	2018
			Jaten	Ngestiharjo	2018
			Brajan	Tamantirto	2019
5	Kretek	3	Mancingan	Parangtritis	2017
			Baros	Tirtohargo	2018
			Galan	Tirtosari	2019
6	Pleret	2	Trukan	Segoroyoso	2017
			Depok	Wonolelo	2019
7	Pundong	3	Dermojurang	Seloharjo	2018
			Pranti	Srihardono	2019
			Gunung Puyuh	Panjangrejo	2017
8	Sedayu	2	Dingkikan	Argodadi	2018
			Gunungpolo	Argorejo	2018
9	Sewon	4	Cabeyan	Panggungharjo	2016
			Saman	Bangunharjo	2017
			Kowen 2	Timbulharjo	2017
			Ngaglik	Pendowoharjo	2017
10	Srandakan	2	Wonotingal	Poncosari	2017
			Puron	Trimurti	2018
11	Sanden	2	Karanganyar	Gadingharjo	2017
			Wonoroto	Gadingsari	2018
12	Bantul	2	Cepoko	Trirenggo	2016
			Grujugan	Bantul	2018
13	Imogiri	2	Karangrejek	Karantengah	2017
			Nogosari	Selopamioro	2018
14	Jetis	2	Cembing	Trimulyo	2017
			Gadungan Kepuh	Canden	2018
15	Pajangan	2	Ngincep	Triwidadi	2017
			Kabrokan Wetan	Sendangsari	2018
16	Dlingo	2	Jambewangi	Temuwuh	2018
			Semuten	Jatimulyo	2018
17	Pandak	2	Jalakan	Triharjo	2017
			Gumulan	Caturharjo	2018
Jumlah		47			

Sumber: Data Kampung KB 2020 (diolah)

Adapun pesebaran lokasi Kampung KB pada 17 Kecamatan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



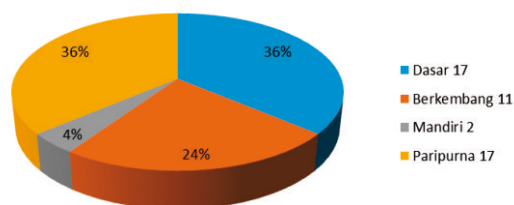
Gambar 1. Grafik Pesebaran Kampung KB
Sumber: Data Kampung KB 2020 (diolah)

Kampung KB yang berjumlah 47 berdasarkan kriteria klasifikasi terdapat 17 kampung dengan prosentase 36% klasifikasi dasar, 11 kampung dengan prosentasi 24% klasifikasi berkembang, 2 kampung dengan prosentase 4% klasifikasi mandiri dan 17 kampung dengan prosentase 36% klasifikasi paripurna. Klasifikasi tersebut berdasarkan laporan online yang dilakukan oleh masing masing Kampung KB.

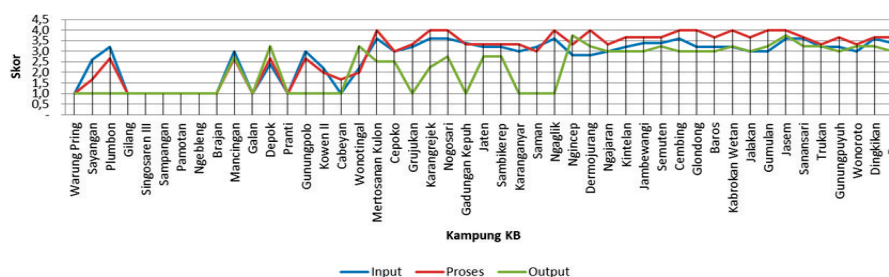
Adapun kondisi yang ada di Kabupaten Bantul prosentasi klasifikasi dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2. Klasifikasi Kampung KB

Sumber: Data Kampung KB 2020 (diolah)



lanjut ada pada tabel berikut:



Gambar 3. Grafik Indikator input proses output

Sumber : Data Kampung KB 2020 (diolah)

Tabel 3. Pengelompok Indikator ke dalam Variabel Input, Proses dan Output

Variabel Input	Variabel Proses	Variabel Output
1. Kepemilikan sarana sekretariat dan rumah data	6. Penggunaan data dalam perencanaan	9. Kesertaan keluarga dalam Poktan (BKB, BKR, BKL, UPP, KS, PIK-R)
2. Keberadaan Pokja	7. Pelaksanaan mekanisme operasional	10. Capaian KB aktif
3. Adanya unit kerja	8. Jumlah lintas sektor	11. Capaian
4. Kepemilikan		12. PUS tidak

Hasil yang didapat setelah melalui proses skoring didapat data sebagai berikut:

Data tersebut menunjukkan bahwa input awal sangat berpengaruh pada proses dan output yang dihasilkan dalam pengelolaan Kampung KB.

Penyelenggaraan Kampung KB dikelola oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang dibuat berdasarkan musyawarah warga. Pembentukan kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing wilayah dan target sasaran yang ingin dicapai.

Sehingga pendampingan pembentukan Kampung KB dimulai sejak pembentukan Pokja oleh PLKB sampai dengan proses pelaksanaan operasional termasuk membangun kemitraan. Sinergitas lintas sektoral tersebutlah yang akan menghasilkan output yang optimal.

Kelembagaan

Struktur organisasi Kelompok kerja Kampung KB terpisah dan mandiri, namun dukungan dari KKLPM. PKK Dusun, RT juga menjadikan kelembagaan Pokja Kampung KB semakin kuat secara keorganisasian. Kelembagaan Pokja Kampung KB diperkuat dengan SK Lurah Desa, karena sesuai kebijakan yang berlaku bahwa basis Kampung KB ada di tingkat Desa, sedangkan Dusun yang ditunjuk menjadi prioritas sasaran kegiatan.

Pengelolaan Kampung KB sangat ditunjang oleh Pokja Kampung KB yang disepakati bersama. Pembentukan Pokja Kampung KB disesuaikan dengan kondisi wilayah, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Susunan Kelompok Kerja Kampung KB disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan di masing-masing wilayah, namun secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab
2. Penasehat
3. Pembina
4. Ketua
5. Sekretaris
6. Bendahara
7. POKJAPOKJA:
 - a. Agama
 - b. Kesehatan & Reproduksi

- Posyandu Balita
- Posyandu Remaja
- Posyandu Lansia
- Posbindu PTM

c. Kasih Sayang

d. Perlindungan

e. Pendidikan

- Bina Keluarga Balita
- Bina Keluarga Remaja
- Bina Keluarga Lansia
- PAUD
- PIK Remaja

f. Sosial Budaya

g. Ekonomi

h. Pelestarian Lingkungan

I. Data dan Lingkungan

Pengembangan pengelolaan Pokja Kampung KB sangat membutuhkan dukungan partisipasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Perencanaan yang baik dari awal secara berkesinambungan akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Pengumpulan data awal dan pemetaan serta penentuan arah dan tujuan pembentukan Kampung KB juga menjadi bagian yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Data kependudukan yang akurat yang bersumber dari hasil pendataan keluarga dilengkapi data potensi dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program kegiatan secara berkesinambungan.

Pengembangan Kampung KB dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi. Beberapa Kampung KB mengoptimalkan potensi, wisata, dan produk unggulan setempat. Kampung KB Jasem menjadi percontohan dan menjadi referensi

pengelolaan yang baik. Kampung KB lain semisal Dingkikan yang mengembangkan potensi UKM pengrajin jamu, Kampung Pranti yang dicanangkan belakangan namun dalam mengoptimalkan potensi wisata mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Dukungan dan keterlibatan swasta dalam memberdayakan potensi wilayah sangat penting sebagai bentuk gotong royong dari berbagai pihak.

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peran pemerintah melalui kebijakan pembentukan Kampung KB menjadi dasar operasional penyelenggaraan Kampung KB. Dukungan kebijakan pemerintah tersebut mulai dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Dasar dan Tahun Pembentukan Kampung KB

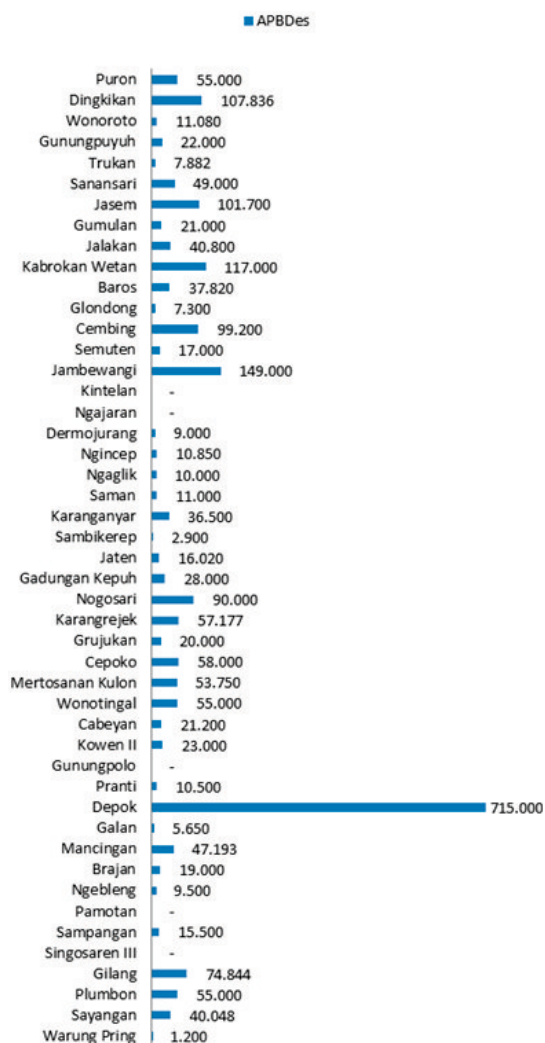
No	Kampung KB	Tahun	Dicanangkan
1	Jasem	2016	Gubernur DIY
2	Cepoko	2016	Bupati Bupati Bantul
3	Trukan	2016	Swadaya Desa
4	Dingkikan	2017	Bupati Bantul
5	Ngajaran	2017	Swadaya Desa
6	Mertosanan	2017	SK Bupati No 330/2017
7	Jambewangi	2017	SK Bupati No 330/2017
8	Karantengah	2017	SK Bupati No 330/2017
9	Cembing	2017	SK Bupati No 330/2017
10	Glondong	2017	SK Bupati No 330/2017
11	Mancingan	2017	SK Bupati No 330/2017
12	Ngincep	2017	SK Bupati No 330/2017

No	Kampung KB	Tahun	Dicanangkan
13	Jalakan	2017	SK Bupati No 330/2017
14	Gunungpuyuh	2017	SK Bupati No 330/2017
15	Karanganyar	2017	SK Bupati No 330/2017
16	Wonotingal	2017	SK Bupati No 330/2017
17	Ngaglik	2017	SK Bupati No 330/2017
18	Kowen II	2017	SK Bupati No 330/2017
19	Saman	2017	SK Bupati No 330/2017
20	Cabeyan	2017	SK Bupati No 330/2017
21	Sanansari	2018	SK Bupati No 431/2018
22	Semuten	2018	SK Bupati No 431/2018
23	Puron	2018	SK Bupati No 431/2018
24	Kintelan	2018	SK Bupati No 431/2018
25	Nogosari	2018	SK Bupati No 431/2018
26	Depok	2018	SK Bupati No 431/2018
27	Kabrokan Wetan	2018	SK Bupati No 431/2018
28	Grujukan	2018	SK Bupati No 431/2018
29	Gumulan	2018	SK Bupati No 431/2018
30	Gunungpolo	2018	SK Bupati No 431/2018
31	Dermojuwang	2018	SK Bupati No 431/2018
32	Sambikerep	2018	SK Bupati No 431/2018
33	Janten	2018	SK Bupati No 431/2018
34	Wonoroto	2018	SK Bupati No 431/2018
35	Gunungkenuh	2018	SK Bupati No 431/2018
36	Sambikerep	2018	SK Bupati No 431/2018
37	Plumbon	2018	SK Bupati No 431/2018
38	Glilang	2018	SK Bupati No 431/2018
39	Samangan	2019	SK Bupati No 431/2019
40	Samangan	2019	SK Bupati No 431/2019
41	Samangan	2019	SK Bupati No 431/2019
42	Samangan	2019	SK Bupati No 431/2019
43	Ngelbeng	2019	SK Bupati No 431/2019
44	Galan	2019	SK Bupati No 431/2019
45	Pranti	2019	SK Bupati No 431/2019
46	Warungpring	2019	SK Bupati No 431/2019

Sumber: Data Kampung KB 2020

Kebijakan Pemerintah yang sangat mendukung penyelenggaraan Kampung KB adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kampung Keluarga Berencana. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan Pokja Kampung KB harus didukung oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wujud keseriusan dalam program pemberdayaan masyarakat pada Kampung KB yang ditunjuk. Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB pada Tingkat Kabupaten, Kecamatan Dan Desa dan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB pada tingkat dusun diamanatkan pada Peraturan Bupati tersebut.

Dukungan alokasi dana dari Pemerintah Desa juga menjadi indikator keseriusan dalam melaksanakan program ini. Dalam grafik dapat ditunjukkan sebagai berikut.



bahwa dukungan pembiayaan yang berasal dari Desa sangat dibutuhkan. Sehingga perlu membuat rencana kegiatan dan pembiayaan yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah Desa.

Gambar 4. Musyawarah Pokja Kampung KB Ngajaran

Sedangkan Nurwendah (PKB Desa Trimurti) menegaskan bahwa basis Kampung



KENDALA YANG DIHADAPI

Ada beberapa masalah yang dilihat dari beberapa aspek yang dihadapi dalam Pengelolaan Kampung KB yaitu:

1. Lokasi Kampung KB adalah dusun atau Kampung yang mempunyai kriteria penduduk yang berkategori Pra Sejahtera paling banyak, sehingga untuk mencari Sumber Daya Manusia (SDM) dari warga masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola Kampung KB sangat terbatas.
2. Kesadaran dari warga masyarakat untuk keluar dari kondisi pra sejahtera membutuhkan waktu dan kekompakan seluruh warga masyarakat.
3. Sebagian Pengelola Kampung KB sudah mampu bersinergis dan menjalin kemitraan, namun sebagian besar masih kerkutat pada permasalahan internal (kurangnya sosialisasi, kurang kompaknya seluruh warga).
4. Kurangnya dukungan dan pendampingan dari unsur pemerintah masih menjadi

kendala keaktifan Pokja Kampung KB (sebagian besar Kampung KB belum secara rutin melakukan evaluasi secara khusus melalui pertemuan rutin).

5. Kurangnya peningkatan kapasitas pengurus dan anggota pengelola Kampung KB melalui pelatihan-pelatihan seperti manajemen, instruktur *outbond*, dan kewirausahaan.
6. Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait yang menyebabkan pengelolaan Kampung KB belum bisa optimal.

Pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan secara luas, berjenjang, bersinergis antar sektor dan bidang. Peran serta dari Organisasi Perangkat Daerah yang secara bersama-sama menggarap Kampung KB akan mempercepat peningkatan taraf perekonomian masyarakat yang pada akhirnya diharapkan program pengentasan kemiskinan mampu mengurangi jumlah keluarga miskin. Efek yang diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB juga meningkat.

Kampung KB sebagai sebuah model pemberdayaan yang di kembangkan oleh BKKBN membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan inovasi dan keberlanjutannya. Dukungan komitmen dan peranan aktif dari seluruh instansi Pemerintah baik Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta berbagai pihak sangat menentukan keberhasilan dan pengelolaan Kampung KB.

Saran dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti adalah:

1. Meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama dengan dukungan Pemerintah Desa agar perencanaan, penetapan prioritas, sasaran dan program kegiatan yang dilakukan masyarakat secara swadaya dan berkelanjutan.
2. Mengoptimalkan rumah data sebagai pondasi untuk membuat pemetaan disinergiskan dengan Sistem Informasi Desa (SID) yang di kembangkan Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Penyusunan Peta Jalan lima tahunan pada 47 Kampung KB juga perlu disusun sesuai potensi dan prioritas secara berkelanjutan agar arah dan tujuan lebih fokus dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Gambar 5. Peresmian Kampung KB



perspektif tunggal. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kampung KB tidak hanya pembangunan di bidang KB, namun keterlibatan lintas sektor sangat berperan besar dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Kampung KB.

BKKBN. (2017). *Pengelolaan Kampung KB*. Jakarta: BKKBN.

BKKBN. (2017). *Pembangunan Keluarga di Kampung KB*. Jakarta: BKKBN.

BKKBN. (2019). *Pengelolaan Kampung KB Percontohan*. Jakarta: BKKBN.

Soetomo. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Perturan Bupati Bantul No 9 Tahun 2019. (2019). Bantul.

BIODATA PENULIS



Rudy Suharta, SIP, MM.

Saat ini selaku Kabid Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Pendidik Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul.

Beberapa tulisan antara lain Gerbang Budaya Imogri (2014), Potensi Pesisir Bantul (2016), Jelajah Potensi Lokal Kecamatan Srandakan (2018). Tulisan yang pernah dimuat dalam Jurnal Riset Daerah antara lain Mengangkat Kembali Potensi Garam Bantul (2011).

Aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, menjadi Sekretaris DPC Pemuda Panca Marga Kabupaten Bantul. Pendiri dan Pengurus Yayasan Veteran Dua Januari. Menjadi Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul yang lebih dikenal dengan sebutan MDMC (Muhammadiyah *Disaster Management Center*). Sejak tahun 2002 bersama rekan-rekannya merintis Relawan Donor Darah yang tergabung dalam Hizbul Wathan *Emergency Humanity* yang mewadai lebih dari 500 relawan pendonor dan telah ribuan kali melayani permintaan donor darah yang dilakukan secara suka rela oleh pendonor.